



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2018
KE KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 27 MARET 2018**

.....

I. PENDAHULUAN

DPR dan Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Pilkada serentak tersebut akan diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 115 kabupaten, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pilkada yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan agenda nasional tersebut dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik dalam hal dukungan anggaran, pelaksanaan setiap tahapan pilkada, hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang berpotensi dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Sebagai mitra kerja dari KPU dan Bawaslu, Komisi II DPR RI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh pentahapan pilkada serentak 2018 harus dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, mengingat semakin dekatnya hari pelaksanaan pemungutan suara, serta untuk mengintensifkan pengawasan terhadap kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak 2018, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI telah membentuk Panja Pengawasan Pilkada Serentak 2018. Mengingat banyaknya jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak

2018, serta persebaran yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, maka ada 4 (empat Panja yang dibentuk oleh Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ini, dimana salah satunya adalah Panja yang melakukan kunjungan ke kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ini.

Panja ini akan bertugas untuk mengumpulkan seluruh data, informasi, maupun masukan dari berbagai pihak terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, yang diantaranya dilakukan melalui kunjungan ke berbagai daerah. Dengan demikian apabila terdapat permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2018 akan segera dapat diupayakan solusinya.

II. ANGGOTA TIM PANJA

Kunjungan kerja Tim Panja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 diikuti oleh 11 Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Tenaga Ahli Komisi II DPR RI (Satya Alvino Pinandito Bya), Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI (Dian Setiono, Muhdar Yusa, Bambang Kriswanto, dan Darmansyah), dan wartawan TV Parlemen (Nanda Ainun).

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan antara Tim Panja Komisi II DPR RI dengan Bupati Temanggung beserta jajarannya dilaksanakan di Pendopo Bupati Temanggung, dengan dihadiri pula oleh unsur Forkopimda, KPU, dan Panwaslu Kabupaten Temanggung, dimana melalui pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI memperoleh berbagai informasi, penjelasan, maupun masukan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung diikuti oleh 3 (tiga pasangan calon, masing-masing adalah :

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Bambang Sukarno & Mutoha	PDIP dan PKB
2.	Haryo Dewandono & Irawan Prasetyadi	Nasdem, Demokrat, Hanura
3.	Al Khadziq & Heri Ibnu Wibowo	Golkar, PAN, Gerindra, PPP

- Berdasarkan Berdasarkan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan, Pemilih yang terdaftar dalam DPS adalah sebanyak 598.200 orang. Diperkirakan jumlah pemilih DPT/Hari H akan mengalami penurunan, karena kemungkinan akan terdapat wajib KTP-el yang terdaftar dalam form AC sampai dengan hari H tidak melakukan rekam KTP-el. Disamping itu, penurunan juga dimungkinkan karena adanya penghapusan pemilih ganda.
- Jumlah TPS adalah sebanyak 1.801 TPS yang tersebar di 289 desa/kelurahan pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung.

2. Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Daerah

- a. Jumlah anggaran yang dihibahkan, dan telah dituangkan dalam NPHD untuk KPU Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp22.254.041.500,-, sedangkan untuk Panwaslu adalah sebesar Rp4.253.817.000,- dan untuk Kepolisian sebesar Rp2.000.000.000,-.
- b. Disamping dalam bentuk anggaran, dukungan lain yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Temanggung antara lain adalah memfasilitasi gedung dan ruangan beserta sarana dan prasarana pendukung untuk PPK dan Panwascam di 20 Kecamatan, memfasilitasi tempat pemasangan APK dan lokasi kampanye, memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan pentahapan pilkada (seperti Pendopo Pengayoman/komplek rumah dinas Bupati), dan lain-lain.

- c. Terdapat perbedaan jumlah DPS yang belum rekam KTP-el antara Dinas Dukcapil Kabupaten Temanggung dengan KPU Kabupaten Temanggung. Menurut KPU masih terdapt 22.068 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, sedangkan berdasarkan data Dukcapil jumlahnya hanyua sekitar 12 ribuan. Sehubungan dengan masalah tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Temanggung akan melakukan pengecekan ulang terhadap 22.068 yang belum terekam KTP-el, dan akan melakukan strategi jemput bola, terutama ke sekolah-sekolah, untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula.

3. Kesiapan Penyelenggara

A. KPU Kabupaten Temanggung

1. Badan penyelenggara yang terdiri dari PPK, PPS, dan PPDP telah dibentuk dan dilantik sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan, sedangkan pembentukan KPPS baru akan dimulai prosesnya pada tanggal 3 April 2018.
2. Untuk pengadaan alat peraga kampanye (APK), beberapa barang sudah sampai dan paling lambat tanggal 8 April 2018 sudah akan mulai terpasang.
3. Penertiban APK dilakukan berkoordinasi dengan Panwaslu, Tim kampanye, DPU, Polres, Satpol, dan Perhubungan.
4. Kebutuhan 3.725 kotak suara dan 7.204 bilik suara dapat tercukupi mengingat ketersediaan stok yang ada saat ini adalah 7.605 kotak dan 8.944 bilik. Untuk kebutuhan surat suara akan dilakukan pemenuhannya melalui e-purchasing LPSE KPU pada Mei 2018. Sedangkan alat kelengkapan TPS lainnya seperti bantalan dan alat coblos sudah dilaksanakan pada 19 Maret 2018.
5. Pendistribusian logistik akan mulai dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

B. Panwaslu Kabupaten Temanggung

1. Panwas Kecamatan telah terbentuk dan dilantik sejak tanggal 14 September 2017, dan hingga saat ini telah dilakukan bimbingan teknis maupun pembekalan terhadap mereka. Sedangkan Pengawas Desa/Kelurahan telah ditetapkan sebanyak 289 orang dan dilantik pada tanggal 14 Januari 2018.
2. Tugas pengawasan telah dilaksanakan di masing-masing pentahapan, yaitu mulai dari tahap persiapan, pendaftaran pasangan calon, dan kampanye, dan dari hasil pengawasan yang dilakukan tidak terdapat permasalahan yang bersifat krusial yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan dengan semua pihak (baik dengan KPU, Sentra Gakkumdu, maupun dengan unsur masyarakat), sehingga setiap permasalahan yang berpotensi dapat mengganggu jalannya pentahap dapat segera dicarikan solusinya.

4. Kesiapan Pengamanan

- a. Untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 2018 di kabupaten Temanggung, Kepolisian RI akan mengerjukkan 550 personil, yaitu 450 personil dari Polres Temanggung dan 100 personil dari Brimob Polda Jateng. Kekuatan tersebut akan didukung pula oleh personil dari TNI (273 orang), Dishub (30 orang), Satpol PP (30 orang), Linmas (4.320 orang), dan Satgas Partai (600 orang).
- b. Pelaksanaan pengamanan dilakukan sesuai dengan Protap yang berlaku, yang teknis operasionalnya dilakukan dengan memperhatikan hasil pemetaan terhadap potensi kerawanan pada masing-masing wilayah.
- c. Upaya antisipasi dilakukan dengan cara yang sifatnya Pre-emptif, preventif, maupun melalui penegakan hukum, dengan tetap melibatkan pula para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Temanggung.

IV. KESIMPULAN

1. Persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Temanggung berjalan cukup lancar, dan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan pihak keamanan juga mendukung kelancaran pelaksanaan masing-masing tahapan.
2. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama terbukti sangat efektif dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Temanggung
3. Masih terdapat perbedaan data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Temanggung dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait jumlah wajib KTP-el yang belum direkam.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan ke Kabupaten Temanggung dan data serta informasi yang diperoleh, Panja Pengawasan Pilkada Serentak 2018 Komisi II DPR RI merekomendasikan sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait KTP elektronik harus segera ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin tidak ada warga masyarakat yang merupakan wajib KTP-el tercederai hak politiknya.
2. Model pendekatan dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Polres Temanggung dan pihak TNI terbukti sangat efektif dan dapat dijadikan rujukan oleh daerah lain yang juga menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pilkada Serentak 2018 Wilayah Jateng dan Sulawesi Komisi II DPR RI. Seluruh masukan dan saran yang diterima oleh Panja juga akan menjadi bahan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian/Lembaga terkait, terutama yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panja, kami ucapkan terima kasih.